

Orasi Ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung



URBANISASI WILAYAH DI ERA GLOBAL: MEMUSAT KE PINGGIR, MENATA DAERAH TAK BERTUAN

Profesor Delik Hudalah
Sekolah Arsitektur, Perencanaan,
dan Pengembangan Kebijakan
Institut Teknologi Bandung

**Aula Barat ITB
20 Agustus 2022**

**Orasi Ilmiah Guru Besar
Institut Teknologi Bandung**
20 Agustus 2022

Profesor Delik Hudalah

**URBANISASI WILAYAH DI ERA GLOBAL:
MEMUSAT KE PINGGIR, MENATA DAERAH
TAK BERTUAN**



Forum Guru Besar
Institut Teknologi Bandung

Hak cipta ada pada penulis

Judul: URBANISASI WILAYAH DI ERA GLOBAL:
MEMUSAT KE PINGGIR, MENATA DAERAH TAK BERTUAN
Disampaikan pada sidang terbuka Forum Guru Besar ITB,
tanggal 20 Agustus 2022.

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama **7 (tujuh) tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)**.
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama **5 (lima) tahun** dan/atau denda paling banyak **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.

Hak Cipta ada pada penulis

Delik Hudalah

URBANISASI WILAYAH DI ERA GLOBAL:
MEMUSAT KE PINGGIR, MENATA DAERAH TAK BERTUAN
Disunting oleh Delik Hudalah

Bandung: Forum Guru Besar ITB, 2022

vi+60 h., 17,5 x 25 cm

ISBN 978-602-6624-59-8

1. Perencanaan Kawasan Perkotaan 1. Delik Hudalah

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang hanya kepada-Nya saya memuji, memohon pertolongan, dan mohon ampunan. Berkat kasih sayang dan hidayah-Nya, saya akhirnya dapat menyelesaikan naskah orasi ilmiah ini. Penghargaan dan rasa hormat serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung, atas perkenannya saya menyampaikan orasi ilmiah ini pada Sidang Terbuka Forum Guru Besar.

Orasi ilmiah ini berupaya merangkaikan dan mengintegrasikan sejumlah hasil penelitian saya sekira lima belas tahun terakhir yang diantaranya berupaya mengkontekstualisasikan pengaruh globalisasi dan desentralisasi terhadap perkembangan dan perencanaan kawasan perkotaan. Tujuan spesifik orasi ini adalah menjelaskan dan mensintesis perkembangan dan perencanaan kawasan perkotaan di Indonesia dengan penekanan pada perencanaan kawasan pinggiran perkotaan.

Semoga tulisan ini dapat memberikan pancingan, wawasan, dan inspirasi yang bermanfaat bagi para pembaca.

Bandung, 20 Agustus 2022

Delik Hudalah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
1. PENDAHULUAN	1
2. KAWASAN PERKOTAAN DAN URBANISASI WILAYAH	3
3. TRANSFORMASI KAWASAN PINGGIRAN	9
4. PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN	14
5. PENUTUP	22
UCAPAN TERIMA KASIH	24
DAFTAR PUSTAKA	25
CURICULUM VITAE	33

URBANISASI WILAYAH DI ERA GLOBAL: MEMUSAT KE PINGGIR, MENATA DAERAH TAK BERTUAN

1. PENDAHULUAN

Kawasan perkotaan adalah mesin pertumbuhan ekonomi. Bagi sejumlah negara besar seperti Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan India, kawasan perkotaan berperan sentral sebagai katalis untuk mempercepat pembangunan nasional (Jha, 2021). Lebih jauh lagi, dengan semakin terbatasnya kekuasaan negara di era global, persaingan antar negara menjadi memudar dan semakin digantikan oleh persaingan antar kawasan perkotaan. Secara sederhananya, jejaring perkotaan semakin merefleksikan jejaring ekonomi dunia. Semakin kawasan perkotaannya terhubung dengan sistem kota dunia maka semakin tinggi kesempatan suatu negara untuk dapat menguasai atau setidaknya mempengaruhi tatanan ekonomi dunia.

Sejak akhir tahun 2008, sudah lebih dari separuh penduduk dunia adalah penduduk perkotaan. Sekitar 60 persen dari penduduk perkotaan dunia tinggal di 1934 aglomerasi perkotaan atau kawasan metropolitan (UN-Habitat, 2020). Dengan lebih dari 270 juta jiwa penduduk yang 55 persennya adalah penduduk perkotaan, saat ini Indonesia menempati negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia memiliki satu kota raksasa (berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa) dan setidaknya 10

kawasan perkotaan yang telah resmi ditetapkan menurut rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN) sebagai kawasan strategis nasional (KSN) metropolitan. Seiring dengan euforia otonomi daerah, sebagian besar penduduk kawasan metropolitan ini tinggal di kawasan pinggiran yang perkembangannya seringkali meluas melewati batas administrasi kota asalnya. Berkat Penanaman Modal Asing (PMA), pengembang swasta berskala besar, dan industrialisasi, banyak dari kawasan pinggiran ini, khususnya di sekitar Jakarta, kini telah berubah menjadi kawasan dengan pertumbuhan tercepat dan melampaui kecepatan pertumbuhan kota intinya (Hudalah & Firman, 2012).

Makalah ini bermaksud merangkaikan dan mengintegrasikan sejumlah hasil penelitian saya sekira lima belas tahun terakhir yang diantaranya berupaya mengkontekstualisasikan pengaruh globalisasi dan desentralisasi terhadap perkembangan perencanaan kawasan perkotaan. Tujuan spesifik makalah ini adalah menjelaskan dan mensintesis perkembangan dan perencanaan kawasan perkotaan di Indonesia dengan penekanan pada perencanaan kawasan pinggiran perkotaan. Makalah ini berargumen bahwa globalisasi dan turunannya telah mendorong urbanisasi semakin mewilayah, pusat perkotaan semakin bergeser ke pinggir, dan perencanaan semakin berfokus pada dimensi kelembagaan seiring dengan meningkatnya tantangan dan persoalan daerah abu-abu atau tak bertuan.

Makalah ini disusun dengan organisasi sebagai berikut. Setelah

pendahuluan ini, saya mengupas bagaimana urbanisasi wilayah di Indonesia skalanya semakin meluas sehingga tidak lagi hanya berwujud kota sebagaimana lazimnya kita pahami tetapi kawasan perkotaan yang mencakup tidak hanya kota tetapi juga kawasan pinggirannya dan bahkan kota dan wilayah lain. Bagian selanjutnya membahas bagaimana transformasi kawasan pinggiran berkembang menjadi proses yang paling krusial dari restrukturisasi kawasan perkotaan. Menyikapi fenomena restrukturisasi ruang ini, bagian berikutnya mengelompokkan sejumlah pendekatan perencanaan yang berkembang di sejumlah kasus kawasan perkotaan dan kawasan pinggiran yang mengalami tahapan kritis dalam transformasi fisik, ekonomi, atau kelembagaannya. Makalah ini menyimpulkan bahwa perencanaan kawasan perkotaan di Indonesia perlu menitikberatkan pada integrasi rejim perencanaan, penguatan kapasitas kelembagaan, memposisikan ulang peran negara, serta kerja sama antar daerah.

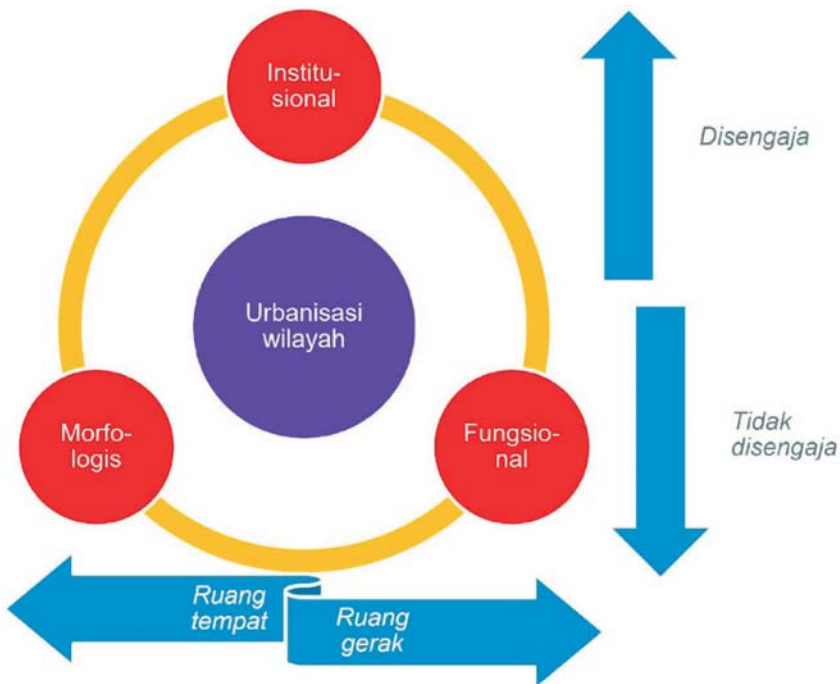
2. KAWASAN PERKOTAAN DAN URBANISASI WILAYAH

Kawasan perkotaan bukanlah konsep yang homogen. Menurut skala pengamatannya, definisi kawasan perkotaan yang relevan dengan diskusi kita dapat dibagi menjadi tiga. Pertama, secara mikro kawasan perkotaan dapat didefinisikan sebagai bagian wilayah fungsional di dalam suatu kota yang mapan. Contohnya adalah kawasan pusat kota, kawasan permukiman, kawasan perdagangan, dan kawasan industri. Pada skala

menengah, kawasan perkotaan merujuk pada wilayah fungsional perkotaan yang terdiri dari kota inti dan kawasan pinggiran di sekitarnya yang mengalami proses pengkotaan dan perkembangannya dipengaruhi oleh kota inti tersebut. Contohnya adalah aglomerasi perkotaan dan kawasan metropolitan. Adapun menurut definisi makro, kawasan perkotaan tidak lain adalah sistem kota-kota, yakni sekumpulan kota-kota yang saling terkait dan membentuk tatanan tertentu karena jaraknya relatif berdekatan atau interaksinya intensif. Contohnya adalah kawasan mega-urban, megaregion, koridor perkotaan, dan jejaring kota-kota.

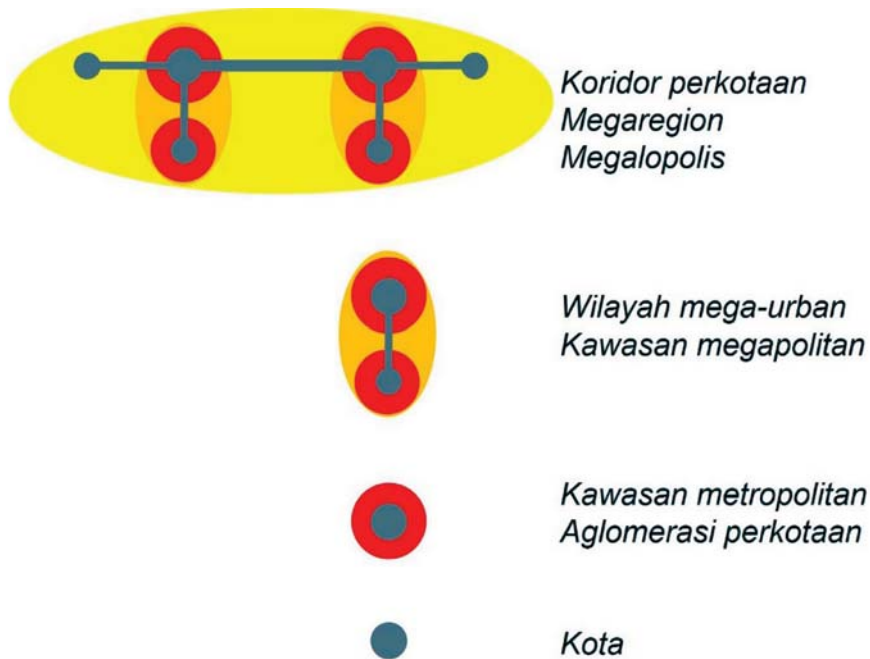
Kawasan perkotaan tidaklah terbentuk secara serta merta. Bahkan, sejumlah kawasan perkotaan mungkin saja terbentuk melalui proses urbanisasi wilayah yang cukup rumit dan berlangsung cukup lama. Kawasan perkotaan tidaklah statis dan dapat senantiasa berevolusi menyesuaikan dengan perubahan dan disrupsi internal maupun eksternal. Secara analitis, menunjukkan proses urbanisasi wilayah ini dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yakni proses yang tidak disengaja (*unintentional*) dan disengaja (*intentional*) (Gambar 1), yang dalam praktiknya saling terkait, saling melengkapi, dan sulit untuk benar-benar dipisahkan antara satu dengan lainnya (Hudalah et al., 2020). Pertama adalah proses pembentukan yang tidak disengaja (*unintentional*) yang terdiri dari proses morfologis dan fungsional. Proses morfologis menunjukkan proses pembentukan yang paling konvensional dan pada dasarnya merupakan proses perwujudan kawasan perkotaan sebagai

ruang tempat (*space of place*) yang terdiri dari kumpulan lokasi kegiatan konkret. Wujudnya adalah bentukan yang dapat diamati secara visual seperti konsentrasi bangunan, konsentrasi penduduk dan jaringan infrastruktur penghubungnya. Adapun proses fungsional merujuk pada proses perwujudan kawasan perkotaan sebagai ruang gerak (*space of flows*) (Castells, 2011). Kawasan perkotaan yang terbentuk diejawantahkan dengan aliran-aliran unsur yang teramati secara visual maupun tidak seperti aliran orang, barang, dan informasi. Terakhir, kawasan perkotaan bisa juga terbentuk secara sengaja (*intentional*). Hasilnya bisa berupa ruang-ruang diciptakan secara terencana melalui proses kebijakan dan pelembagaan secara formal maupun informal.



Gambar 1 Dimensi urbanisasi wilayah

Menurut skala ruangnya, kawasan perkotaan dapat terbagi ke dalam beberapa kategori mulai dari yang paling kecil dan sederhana hingga yang paling besar dan rumit (Gambar 2). Skala yang paling kecil adalah kota, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai konsentrasi lingkungan terbangun atau tempat memusatnya kegiatan ekonomi non-pertanian. Dalam perkembangannya, pertumbuhan kota ini dapat menyebar ke kawasan pinggirannya sehingga terbentuklah aglomerasi perkotaan atau kawasan metropolitan. Kawasan metropolitan yang berdekatan pada gilirannya mungkin saja berinteraksi dan menyatu membentuk satuan ruang yang lebih luas, yakni wilayah mega-urban. Terakhir, wilayah-wilayah mega-urban yang saling berjejing dapat berintegrasi membentuk megaregion, yakni suatu entitas perkotaan dengan skala paling besar sehingga memiliki kontribusi yang dominan terhadap ekonomi nasional dan mampu bersaing secara global. Megaregion, terutama yang berkembang di sepanjang pantai, seringkali berbentuk koridor perkotaan atau sederetan perkotaan yang berkembang secara linear yang panjang totalnya dapat mencapai ratusan bahkan ribuan kilometer.



Gambar 2 Skala ruang kawasan perkotaan

Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang lazimnya terdiri dari satu kota inti yang dikelilingi oleh kawasan pinggirannya. Proses urbanisasi yang menggambarkan tahapan lanjut dari metropolitanisasi adalah suburbanisasi atau proses aglomerasi internal berupa perluasan dari kota inti menuju kawasan pinggirannya (Hudalah & Firman, 2012). Pola ruang pencirinya termasuk diantaranya kota satelit dan kawasan perumahan berskala besar yang biasanya tersebar di kawasan pinggiran metropolitan. Aliran fungsional yang mendominasi proses metropolitanisasi adalah ulang-alik harian. Itu sebabnya, jaringan fisik penghubung utama antara bagian-bagian kawasan metropolitan biasanya berupa jalan utama, kereta api komuter, dan jalan tol pinggiran

kota. Isu-isu kebijakan yang mewarnai perkembangan kawasan metropolitan di Indonesia seperti Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi) dan Kartamantul (Yogyakarta-Sleman-Bantul) diantaranya adalah pelayanan dasar (seperti transportasi, sampah, air bersih, dan drainase) dan koordinasi antar lembaga pemerintah daerah kota/ kabupaten (Firman, 2010, 2014; Hudalah et al., 2014; Hudalah, Fahmi, et al., 2013).

Satu atau dua kawasan metropolitan yang berdekatan beserta wilayah desa-kota yang menghubungkan antara keduanya dapat menyatu sehingga terbentuklah kawasan mega-urban (Jones & Douglass, 2008; McGee & Robinson, 1995). Mega-urbanisasi secara khas ditandai dengan desakotasi, yakni proses percampuran secara tidak terencana antara guna lahan pertanian dan non-pertanian yang biasanya terjadi di koridor di sekitar kota-kota besar yang sebelumnya merupakan lokasi desa-desa berpenduduk padat (McGee, 1991). Sebagaimana terjadi di koridor Bandung-Jakarta, desakotasi biasanya dipicu oleh pembangunan zona industri dan kawasan industri. Jalan tol dan kereta api antar kota menjadi jaringan fisik penciri mega-urbanisasi yang biasanya dibangun untuk menunjang aliran komuting mingguan antar kawasan metropolitan pembentuk mega-urbanisasi. Persoalan kebijakan yang mengiringi mega-urbanisasi antara lain adalah alih fungsi lahan pertanian dan koordinasi antar lembaga sektoral pemerintahan (Firman, 2000).

Proses urbanisasi wilayah paling luas yang mungkin sudah mulai

terjadi di Indonesia adalah megaregionalisasi. Proses ini ditandai dengan meningkatnya interaksi sekumpulan kawasan metropolitan dan mega-urban beserta wilayah eksurbannya (Florida et al., 2008; Harrison & Hoyler, 2015; Ross, 2009). Hudalah dkk (2020) menunjukkan bahwa, sebagaimana terjadi di Pantai Utara Jawa (Pantura), melalui megaregionalisasi lah bentukan ruang baru dan mutakhir seperti megaprojek, kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kota transit lebih mudah terwujud. Selain itu, migrasi musiman dan pengiriman barang menjadi fenomena aliran yang unik. Pergerakan intensif jarak jauh ini biasanya ditunjang dengan tersedianya jalan tol antar wilayah, kereta api antar wilayah berkecepatan menengah atau tinggi, pelabuhan laut, dan bandara. Salah satu proses khas dalam megaregionalisasi adalah eksurbanisasi atau urbanisasi antara, yakni transformasi kawasan perdesaan menjadi kawasan perkotaan dengan skala besar dan terencana pada lahan-lahan yang sebelumnya terabaikan atau tidak produktif yang berlokasi di luar atau di antara kawasan mega-urban (Hudalah et al., 2020). Isu kebijakan yang mungkin muncul pada skala megaregion diantaranya ekologi, ketahanan pangan-energi-air, ketimpangan wilayah, daya saing wilayah, dan koordinasi nasional-lokal.

3. TRANSFORMASI KAWASAN PINGGIRAN

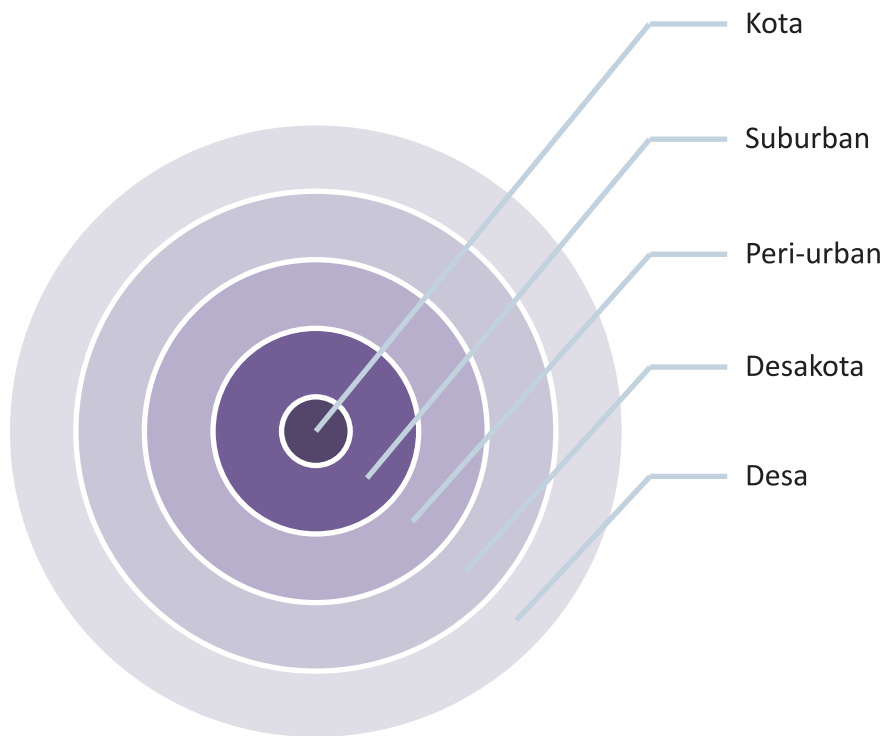
Kawasan pinggiran merupakan bagian kawasan perkotaan yang lebih kritis dalam penataan ruang karena biasanya wilayahnya lebih luas,

penduduknya lebih banyak, dan perkembangannya lebih cepat dan lebih sulit diprediksi dibandingkan dengan kota inti. Dalam konteks kawasan perkotaan, sebagai bentukan ruang layaknya kota, kawasan pinggiran dapat dipahami melalui dua sudut pandang, yakni struktur ruang dan pola ruang. Dari kacamata struktur ruang, kawasan pinggiran dapat membentuk pusat kota baru melalui proses dekonsentrasi. Sementara itu, sudut pandang pola ruang secara umum melihat kawasan pinggiran sebagai zona transisi antara desa dan kota.

Pertama, dekonsentrasi adalah proses di mana suatu wilayah menjadi mengkota seluruhnya (de Souza, 2001; Hudalah, Viantari, et al., 2013). Prosesnya ditandai dengan penyebaran besar-besaran penduduk dan lapangan kerja menuju kawasan pinggiran (Bontje, 2016; Carlino & Chatterjee, 2002). Dengan kata lain, dekonsentrasi dicirikan dengan penurunan jumlah penduduk dan pekerjaan di kota inti yang diimbangi dengan peningkatan keduanya di kawasan pinggiran. Jika dekonsentrasi penduduk mempertahankan peran kota inti sebagai satu-satunya pusat kawasan perkotaan (*monocentric*), dekonsentrasi pekerjaan menumbuhkan pusat-pusat baru di kawasan pinggiran sehingga mengubah struktur ruang kawasan perkotaan menjadi berpusat banyak (*polycentric*) (Kloosterman & Musterd, 2016). Dalam konteks masyarakat pasca-industri di negara-negara maju, dekonsentrasi pekerjaan telah difokuskan pada layanan bisnis seperti kawasan perkantoran. Sementara itu, kasus-kasus di negara berkembang seperti Indonesia, seperti

Jabodetabek dan Gerbangkertasusila menunjukkan bahwa penyebaran industri pengolahan masih merupakan fitur penting dekonsentrasi pekerjaan (Hudalah, Benita, et al., 2019; Hudalah, Viantari, et al., 2013). Hal ini dapat diindikasikan dengan persebaran kawasan dan kota industri menuju kawasan pinggiran. Tanpa perencanaan yang terintegrasi pada skala wilayah, dekonsentrasi ini dapat dapat bersifat acak (*sprawl*) yang boros lahan dan energi dan berbiaya ekonomi tinggi (Gordon & Richardson, 2007).

Sebagai suatu bentuk pola ruang, kawasan pinggiran perlu didefinisikan lebih dari sekedar “antar muka” (interface), “tepi” (fringe/edge), atau “zona transisi” dengan batas-batas yang jelas (Simon et al., 2004, 2006). Lebih dari itu, kawasan pinggiran adalah suatu kawasan fungsional yang sedang mengalami proses transformasi perkotaan. Kawasan pinggiran dapat menempati wilayah yang sangat luas dengan radius puluhan hingga ratusan kilometer dari kota utama (Webster et al., 2016). Dengan demikian, kawasan pinggiran merupakan kawasan tak bertuan atau abu-abu yang seringkali sulit ditentukan batas-batas fisik pastinya (Hudalah et al., 2016). Biasanya kawasan pinggiran cenderung membentuk gradasi bahkan spektrum dengan kemapanan yang beragam diantara ciri perdesaan dan perkotaan. Secara konseptual, kawasan pinggiran ini dapat dibagi menjadi tiga berdasarkan kedekatan atau intensitas interaksinya dengan desa atau kota terdekat, yakni kawasan suburban, kawasan peri-urban, dan kawasan desakota (Gambar 3).



Gambar 3 Kawasan pinggiran sebagai wilayah fungsional

Kawasan suburban merupakan kawasan di sekitar kota inti yang memiliki banyak karakteristik yang mirip seperti kota inti tetapi tidak lengkap dan sehingga memiliki sejumlah ketergantungan terhadap kota inti terdekatnya. Secara morfologis, kawasan suburban memiliki kepadatan yang relatif lebih rendah dibandingkan kota inti dan batasbatasnya tidak terlalu jelas. Jika kawasan suburban memiliki fungsi pokok sebagai tempat bermukim maka kawasan paska-suburban berfungsi seperti layaknya kota, yakni tempat bermukim maupun bekerja. Meskipun fungsi kawasan paska-suburban sudah lebih mirip dengan kota, kegiatan ekonomi atau penggunaan lahannya lebih homogen atau

monofungsional, misalnya kawasan industri, perkantoran, atau pelabuhan saja. Gaya hidup masyarakat suburban biasanya lebih individual, libertarian, dan kosmopolitan. Privatisasi ruang, fasilitas, pelayanan, dan bahkan infrastruktur adalah fenomena yang lebih mudah ditemukan di kawasan pinggiran yang seringkali menyebabkan terjadinya peningkatan segregasi sosial dan fragmentasi ruang.

Kawasan peri-urban adalah wilayah perluasan kota besar yang sudah terlampaui padat. Peri-urbanisasi secara umum dapat didefinisikan sebagai transformasi fisik, ekonomi dan sosial kawasan perdesaan yang sebelumnya terletak di pinggiran kota-kota mapan menjadi lebih bersifat perkotaan (Webster et al., 2016). Transformasi seperti itu dapat terjadi di sekitar ruang yang sebelumnya kosong atau berdampingan dengan permukiman perdesaan yang padat penduduk. Peri-urbanisasi dapat terjadi secara serampangan, yaitu menempati petak-petak lahan pertanian yang sebelumnya subur dan merambah kawasan resapan air dan garis sempadan pantai yang dilindungi (Hudalah et al., 2016). Prosesnya dapat terjadi baik secara spontan, informal, dan sepotong demi sepotong maupun secara terencana dan berskala besar. Peri-urbanisasi di negara berkembang lazimnya bukan merupakan bagian proses alami transformasi masyarakat agraris menuju masyarakat industri, pasca-industri, atau informasi. Akan tetapi, itu lebih sebagai bagian dari agenda eksogen yang lebih besar terkait dengan desentralisasi, neoliberalisasi, dan globalisasi. Hudalah dkk (2007) mengisyaratkan bahwa proses

transformasi spasial dan ekonomi ini seringkali berlangsung sangat cepat dan tidak terduga sehingga kurang mampu diantisipasi oleh kesiapan sistem sosial dan kelembagaan lokal yang ada.

4. PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN

Dalam rangka menyikapi fenomena, menghadapi tantangan, dan menyelesaikan persoalan di atas, saya telah melakukan sejumlah penelitian mengenai model dan praktik perencanaan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan kawasan pinggirannya. Berdasarkan pemetaan Gambar 4, penelitian-penelitian tersebut dapat saya kelompokkan menjadi empat ranah, yakni: perencanaan kawasan pinggiran, pengelolaan kawasan pinggiran, perencanaan kawasan perkotaan, dan pengelolaan kawasan perkotaan. Tema-tema penelitian yang menonjol masing-masing adalah pengembangan kapasitas lembaga, perencanaan wilayah, penskalaan ulang negara, dan kerja sama antar-daerah.



Gambar 4 Tipologi perencanaan kawasan perkotaan

Tantangan fragmentasi fisik dan sosial serta pengaruh neoliberalisasi global mengharuskan perencanaan untuk lebih memperhatikan pelaksanaan dan realisasi rencana daripada sekedar perumusan rencana. Upaya ini dapat dilakukan dengan berfokus pada dimensi politik perencanaan, termasuk aspek organisasi, tata kelola, dan kelembagaan (Healey, 1997). Hudalah dkk (2010a, 2010b, 2016) menyiratkan bahwa pembangunan kapasitas kelembagaan adalah etos deliberatif untuk mengubah gaya dan budaya tata kelola yang tidak diinginkan dengan menghubungkan jejaring pemangku kepentingan, pewacanaan isu dan

pengetahuan mengenai agenda perencanaan, dan momentum serta struktur peluang politik secara interaktif. Penulis yang sama menyebutkan bahwa indikator kinerja pengembangan kapasitas dapat diukur melalui tiga hal. Pertama adalah inklusi strategis, yakni kemampuan perencana untuk melibatkan pemangku kepentingan secara strategis (korporatis) dan seinklusif mungkin dalam proses pengambilan keputusan. Kedua adalah fasilitasi bagian yang lemah, yakni kemampuan perencana untuk meningkatkan, mengakomodasi, memfokuskan, dan menyalurkan kesadaran pemangku kepentingan pada isu dan agenda penting namun sering terabaikan. Terakhir adalah mobilisasi yang sah, yakni kemampuan perencana untuk secara konsisten dan sengaja mewujudkan dan menyampaikan gagasan, strategi, kerangka kerja, dan hasil kebijakan perencanaan yang disepakati. Permasalahan yang dapat muncul pada pengembangan kapasitas kelembagaan adalah sulitnya mengintegrasikan proses ini dengan prosedur teknokratis dan administrasi perencanaan yang berlaku.

Selama ini tidak ada kesatuan sistem dalam perencanaan kawasan perkotaan di Indonesia. Secara umum rejim perencanaan ini dapat terbagi menjadi tiga menurut fokus obyek yang direncanakannya, yakni perencanaan pembangunan, perencanaan sektoral, dan perencanaan tata ruang. Rencana pembangunan meliputi lingkup daerah dan nasional dengan durasi jangka pendek, menengah, dan Panjang. Rencana tata ruang disusun pada lingkup nasional, propinsi, dan kabupaten/ kota, ada

yang bersifat umum dan ada yang rinci. Sementara itu, menurut sumber hukumnya, perencanaan kawasan perkotaan terbagi menjadi perencanaan yang memiliki sumber hukum (*statutory*) atau diwajibkan menurut hukum yang berlaku (*mandatory*) dan perencanaan ad hoc (*non-statutory*). Contoh yang terakhir ini adalah rencana arahan presiden (MP3EI, PSN) dan inisiatif swasta (masterplan kota baru). Dalam kasus perencanaan Megaregion Pantura, Hudalah dkk (2020) mengindikasikan bahwa rejim-rejim perencanaan di atas seringkali tumpang tindih, bahkan dapat bertentangan satu sama lain. Selain itu, dekade terakhir menunjukkan penguatan dominasi politik perencanaan ad hoc, yang diikuti oleh perencanaan sektoral, karena disinyalir lebih mudah beradaptasi dengan permintaan pasar. Sementara itu, penataan ruang memiliki implikasi yang lebih lemah atau paling rawan menjadi obyek, jika bukan korban, korban negosiasi politik (Hudalah et al., 2020).

Pengaruh langsung globalisasi dan desentralisasi pada perencanaan kawasan perkotaan, khususnya perencanaan megaprojek, adalah semakin merebaknya penskalaan ulang negara (*state rescaling*) (Swyngedouw, 2004). Globalisasi kian memudarkan batas-batas ruang dan memaksa institusi sosial berbasis teritorial, khususnya negara, untuk melakukan penskalaan ulang (*rescaling*) yang melibatkan mekanisme penyederhanaan, restrukturisasi, atau transformasi peran, ukuran, dan bentuknya (Brenner, 2004). Penskalaan negara memiliki dua proses, yakni vertikal dan horisontal (Gambar 5). Proses vertikal menunjukkan

penyerahan kekuasaan negara secara skala geografis. Penskalaan vertikal ini terbagi menjadi dua, yakni penyerahan ke atas atau internasionalisasi dan penyerahan ke bawah atau denasionalisasi/desentralisasi. Contoh bentuk internasionalisasi adalah kerja sama antar negara, konvensi internasional, dan organisasi internasional. Desentralisasi memiliki contoh antara lain penugasan, dekonsentrasi, dan delegasi. Sementara itu, proses penskalaan horizontal menunjukkan pembatasan, pelemahan, bahkan pengosongan peran negara sebagai akibat penguatan peran aktor non-pemerintah (masyarakat dan swasta) (Jessop, 2013). Contohnya adalah pembentukan BUMN, KPBU, swasta, dan LSM.



Gambar 5 Tipologi penskalaan ulang negara
Sumber: disempurnakan dari Hudalah dkk (2021)

Menurut Hudalah et al (2021), kasus megaprojek, seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Bandara dan Aerocity Kertajati, menunjukkan bahwa penskalaan negara tidaklah statis, tetapi dinamis dan adaptif semenjak perencanaan hingga implementasi proyek. Penskalaan vertikal ke atas dilakukan diantaranya melalui pengintegrasian dengan proyek strategis nasional, pelibatan lembaga keuangan ekstra-nasional dan pembentukan perusahaan patungan lintas daerah dan lintas negara. Nasionalisasi dan internasionalisasi seperti ini berperan dalam upaya mengurangi risiko kegagalan meskipun, pada saat yang bersamaan, mengorbankan sejumlah upaya membela aspirasi lokal. Sementara itu, penskalaan horizontal biasanya dilakukan melalui kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU), pembentukan perusahaan patungan, dan privatisasi. Skema ini berperan dalam upaya meredam dampak ketidakpastian lingkungan politik, ekonomi, sosial, dan fisik di mana megaprojek berada. Namun, pada saat yang bersamaan bentuk terakhir ini seringkali mengenyampingkan upaya membela kepentingan umum (Hudalah et al., 2021).

Sementara itu, sejak deregulasi dan debirokratisasi besar-besaran di bidang pengelolaan industri pada akhir 1980an, pengosongan peran negara melalui privatisasi telah lama menjadi norma dalam pengelolaan kota dan kawasan industri di kawasan pinggiran, khususnya di Jabodetabek (Hudalah, Viantari, et al., 2013). Menurut Hudalah (2017), perusahaan swasta, yang seringkali berbentuk perusahaan patungan

dengan perusahaan mitra luar negeri atau multinasional, dalam praktiknya tidak sekedar berperan sebagai pengembang dan pengelola lahan dan bangunan tetapi bertindak sebagai pemerintah bayangan (*shadow government*). Sesuai dengan namanya, peran mereka sudah mirip dengan pemerintah sesungguhnya karena mampu menyusun aturan, menyediakan pelayanan, dan menarik berbagai macam pungutan bagi warganya (Garreau, 2011). Bedanya, pengaturan ruang yang mereka lakukan bersifat eksklusif atau tertutup atau terbatas. Lebih jauh lagi, organisasinya berada di luar struktur pemerintah lokal dan wilayah yang sah dan tidak dibentuk melalui mekanisme pemilihan umum ataupun perwakilan (Hudalah, 2017).

Menguatnya peran pemerintahan bayangan di kawasan pinggiran menyebabkan pengelolaan ruang menjadi tidak efisien yang pada gilirannya meningkatkan biaya sosial, ekonomi, dan lingkungan serta menurunkan daya saing kawasan dalam konstelasi persaingan global. Itu sebabnya, seiring dengan euphoria otonomi daerah dan demokratisasi, pada akhir 2000an sejumlah kawasan industri di Cikarang, Kabupaten Bekasi, berinisiatif membangun sebuah tata kelola jejaring (Hudalah & Firman, 2017). Model tata kelola yang melibatkan pengembang kawasan industri, pemerintah, dan BUMN ini mengandalkan hubungan sosial informal dan horizontal daripada kontrak formal dan struktur birokrasi hierarkis dalam mengatur kegiatan sosial-ekonomi, alokasi ruang perkotaan, dan pelibatan aktor (Kim, 2006; Koppenjan & Klijn, 2004;

Provan et al., 2007). Kendala yang dihadapi adalah dominasi peran swasta, kekosongan aturan penunjang, dan lemahnya kepemimpinan maupun daya tawar pemerintah menyebabkan sulitnya menjaga komitmen para aktor untuk berperan secara konsisten dan bertanggung jawab dalam merencanakan, membangun, dan mengelola penggunaan sumber daya bersama seperti infrastruktur jalan penghubung antar kawasan (Hudalah, Nurrahma, et al., 2019).

Dengan pelemahan kekuasaan pemerintah pusat sejak otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan berperan menjadi ujung tombak pengelolaan kawasan perkotaan. Namun, karakteristik kawasan perkotaan yang cenderung memiliki lingkup atau dampak yang bersifat lintas daerah menjadikan upaya tersebut kebanyakan sulit untuk direalisasikan. Di tengah euforia otonomi daerah yang ditandai dengan menjamurnya pemekaran wilayah dan perilaku pemerintah daerah yang bertindak seolah menjadi raja kecil (Firman, 2013), sulit kiranya untuk kita menerapkan pendekatan struktural seperti penggabungan, rasionalisasi, atau konsolidasi batas-batas administrasi agar lebih sesuai dengan lingkup fungsional perkotaan yang berkembang. Pilihan yang lebih mudah diterima secara politik dan memungkinkan secara konstitusional adalah kerja sama antar pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan perkotaan yang bersifat lintas batas administrasi (Hudalah, Fahmi, et al., 2013). Namun, Hudalah dkk (2014) mengingatkan bahwa rupanya upaya kerja sama ini sulit terjadi secara murni sukarela.

Artinya, pendekatan yang berbasis pilihan rasional and kalkulus menemui banyak hambatan sebagai akibat dari tingginya asimetri informasi dan kesenjangan penguasaan sumber daya di antara pemerintah daerah.

Itu sebabnya, penerapan pendekatan sosiologis atau berbasis budaya menurut perspektif institusionalis dapat menjadi pilihan alternatif dalam mendorong kerja sama antar daerah (Hall & Taylor, 2016; Sorensen, 2017). Menurut pendekatan ini, kerja sama dapat diinisiasi secara informal melalui penciptaan budaya, penemuan kembali budaya lama yang masih relevan, dan transformasi atau modifikasi budaya lama yang sudah tidak relevan. Sebagai contoh, Kawasan Perkotaan Yogyakarta-Sleman-Bantul (Kartamantul), dengan mengusung budaya kumpul-kumpul, wayang (bercerita), kekeuargaan (paternalistic), dan tolong menolong (arisan), dianggap cukup berhasil dalam upaya membangun dan mempertahankan kerja sama pengelolaan persampahan, transportasi umum, dan lain-lain (Hudalah et al., 2014).

5. PENUTUP

Skala perkotaan di era global semakin besar, banyak, dan tumpang tindih mulai dari kota inti, metropolitan, mega-urban, hingga megaregion. Perkembangan kawasan perkotaan sebagai perpaduan transformasi ruang tempat dan ruang gerak semakin rumit yang sebagian tidak disadari oleh perencana maupun pengelola kota. Kerumitan yang

terjadi disebabkan oleh perluasan batas fungsional yang melewati batas-batas administrasi, dirupsi dalam pengadopsian teknologi organisasi, transportasi dan informasi, dan dinamika keterlibatan pemangku kepentingan di luar pemerintah dan luar nasional.

Kawasan pinggiran sebagai ruang fungsional yang tak bertuan tetapi paling dinamis dan dominan perkembangannya memiliki peranan krusial dalam menjaga keberlanjutan kawasan perkotaan. Keterhubungan fisik, identitas dan kohesi sosial, pemerataan dan daya saing wilayah, ketahanan air, pangan, dan energi, hingga kelestarian lingkungan adalah isu-isu kritis yang dihadapi para perencana kawasan pinggiran. Perkembangan kawasan pinggiran adalah suatu keniscayaan. Para perencana perlu mengubah perspektif klasik dengan tidak selalu mendudukan kawasan pinggiran sebagai sumber masalah tetapi justru potensi dalam upaya menciptakan ruang wilayah dan kota yang lebih maju dan berkelanjutan.

Perencanaan dan pengelolaan kawasan pinggiran dan perkotaan perlu difokuskan pada tiga hal pokok. Pertama, upaya-upaya penguatan kapasitas kelembagaan lokal perlu dilakukan melalui pembangunan sumber daya manusia, pengembangan jejaring organisasional, dan penguatan nalar politik. Kedua, koordinasi dan sinergitas antara rejim perencanaan sektoral, perencanaan pembangunan, dan perencanaan tata ruang adalah keniscayaan untuk mendorong pembangunan kawasan perkotaan yang lebih terpadu dan terarah. Terakhir, penguatan tata kelola

kawasan perkotaan yang semakin melampaui lingkup kewenangan, sumber daya, dan batas administrasi pemerintahan perlu ditekankan pada upaya pengembangan tidak hanya kerja sama antar aktor dan antar daerah tetapi juga “pengelolaan tata kelola” yang memadukan pendekatan dari bawah (*bottom-up*) dan dari atas (*top down*) dengan memanfaatkan struktur dan peluang politik dan celah hukum nasional yang tersedia dan memobilisasi kekuatan dan keunikan sejarah, sosial, budaya dan ekonomi masing-masing kawasan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah yang hanya kepada-Nya saya memuji, memohon pertolongan, dan mohon ampunan. Selanjutnya, perkenankanlah saya menyampaikan penghormatan dan ucapan terima kasih kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, Pimpinan dan Majelis Wali Amanat ITB, Rektor dan segenap Pimpinan ITB, Pimpinan dan Anggota Senat ITB, dan Pimpinan dan seluruh Anggota Forum Guru Besar ITB atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengemban amanat sebagai dosen ITB dan menyampaikan orasi ilmiah di hadapan hadirin sekalian pada forum yang terhormat ini. Terima kasih banyak saya haturkan kepada Dekan dan para Wakil Dekan, para Ketua Kelompok Keahlian, Para Ketua Program Studi, serta segenap Pimpinan dan Guru saya khususnya di lingkungan Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, lebih khusus lagi

yang tergabung dalam Kelompok Keahlian Perencanaan Wilayah dan Perdesaan dan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota serta Transportasi atas inspirasi, ilmu, bimbingan, dan dukungan yang senantiasa diberikan. Penghargaan yang tinggi saya berikan kepada para kolega dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan mitra yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada saya. Bakti yang ikhlas saya lakukan untuk Ibu, Bapak, Ibu dan Bapak Mertua Rasa, dan Keluarga Besar yang tiada pamrih untuk mendoakan dan menyokong pencapaian cita anak-anaknya. Kasih yang tulus saya berikan kepada Istri dan Anak-anak tercinta yang senantiasa bersama dalam berjuang menyelami kehidupan dan bersabar menemani saya dalam menjalankan tugas-tugas sebagai dosen ITB.

DAFTAR PUSTAKA

- Bontje, M. (2016). Dealing with Deconcentration: Population Deconcentration and Planning Response in Polynucleated Urban Regions in North-west Europe: *Http://Dx.Doi.Org/10.1080/00420980120035330*, 38(4), 769-785. <https://doi.org/10.1080/00420980120035330>
- Brenner, N. (2004). *New state spaces: urban governance and the rescaling of statehood*. <https://doi.org/10.1080/0969229042000282864>
- Carlino, G., & Chatterjee, S. (2002). Employment Deconcentration: A New

- Perspective on America's Postwar Urban Evolution. *Journal of Regional Science*, 42(3), 445-475. <https://doi.org/10.1111/1467-9787.00267>
- Castells, M. (2011). *The Rise of the Network Society* (2nd Edition). John Wiley & Sons. <https://www.amazon.co.uk/Rise-Network-Society-Economy-Information/dp/0631221409>
- de Souza, M. L. (2001). Metropolitan deconcentration, socio-political fragmentation and extended suburbanisation: Brazilian urbanisation in the 1980s and 1990s. *Geoforum*, 32(4), 437-447. [https://doi.org/10.1016/S0016-7185\(01\)00018-5](https://doi.org/10.1016/S0016-7185(01)00018-5)
- Firman, T. (2000). Rural to urban land conversion in Indonesia during boom and bust periods. *Land Use Policy*, 17(1), 13-20. [https://doi.org/10.1016/S0264-8377\(99\)00037-X](https://doi.org/10.1016/S0264-8377(99)00037-X)
- Firman, T. (2010). Multi local-government under Indonesia's decentralization reform: The case of Kartamantul (The Greater Yogyakarta). *Habitat International*, 34(4), 400-405.
- Firman, T. (2013). Territorial Splits (Pemekaran Daerah) in Decentralising Indonesia, 2000-2012: Local Development Drivers or Hindrance? [Http://Dx.Doi.Org/10.1080/13562576.2013.820373](http://Dx.Doi.Org/10.1080/13562576.2013.820373), 17(2), 180-196. <https://doi.org/10.1080/13562576.2013.820373>
- Firman, T. (2014). Inter-local-government partnership for urban management in decentralizing Indonesia: from below or above? Kartamantul (Greater Yogyakarta) and Jabodetabek (Greater Jakarta)

- compared. *Space and Polity*, 18(3), 215-232.
<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13562576.2014.959252>
- Florida, R., Gulden, T., & Mellander, C. (2008). The rise of the mega-region. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 1(3), 459-476.
- Garreau, J. (2011). *Edge City: Life on the New Frontier*. Knopf Doubleday Publishing Group. https://books.google.co.id/books?id=_h4eF9H9UtQC
- Gordon, P., & Richardson, H. W. (2007). Beyond Polycentricity: The Dispersed Metropolis, Los Angeles, 1970-1990. *Https://Doi.Org/10.1080/01944369608975695*, 62(3), 289-295.
<https://doi.org/10.1080/01944369608975695>
- Hall, P. A., & Taylor, R. C. R. (2016). Political Science and the Three New Institutionalisms: *Http://Dx.Doi.Org/10.1111/j.1467-9248.1996.Tb00343.x*, 44(5), 936-957. <https://doi.org/10.1111/J.1467-9248.1996.TB00343.X>
- Harrison, J., & Hoyler, M. (2015). Megaregions: foundations, frailties, futures. In J. Harrison & M. Hoyler (Eds.), *Megaregions: Globalization's new urban form?* (pp. 1-28). Edward Elgar Publishing.
- Healey, P. (1997). *Collaborative planning: Shaping places in fragmented societies*. Palgrave Macmillan.
- Hudalah, D. (2017). Governing industrial estates on Jakarta's periurban area: From shadow government to network governance. Singapore

Journal of Tropical Geography, 38(1), 58-74. <https://doi.org/10.1111/sjtg.12177>

Hudalah, D., Benita, T., & Gumilar, I. (2019). Peri-urbanization in the Surabaya Metropolitan Area: An industrial transformation perspective. In R. Padawangi (Ed.), *Routledge Handbook of Urbanization in Southeast Asia* (pp. 265-276). Routledge.

Hudalah, D., Fahmi, F. Z., & Firman, T. (2013). Regional Governance in Decentralizing Indonesia: Learning from the Success of Urban-Rural Cooperation in Metropolitan Yogyakarta. In T. Bunnell, D. Parthasarathy, & E. C. Thompson (Eds.), *Cleavage, Connection and Conflict: Rural, Urban and Contemporary Asia* (pp. 65-82). Springer.

Hudalah, D., & Firman, T. (2012). Beyond property: Industrial estates and post-suburban transformation in Jakarta Metropolitan Region. *Cities*, 29(1), 40-48. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2011.07.003>

Hudalah, D., & Firman, T. (2017). Mega-suburbanization in Jakarta mega-urban region. In A. Datta & A. Shaban (Eds.), *Mega-Urbanization in the Global South: Fast cities and new urban utopias of the postcolonial state* (pp. 151-168). Routledge.

Hudalah, D., Firman, T., & Woltjer, J. (2014). Cultural Cooperation, Institution Building and Metropolitan Governance in Decentralizing Indonesia. *International Journal of Urban and Regional Research*, 38(6), 2217-2234. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12096>

- Hudalah, D., Nurrahma, V., Sofhani, T. F., & Salim, W. A. (2019). Connecting fragmented enclaves through network? Managing industrial parks in the Jakarta-Bandung Urban Corridor. *Cities*, 88, 1-9. <https://doi.org/10.1016/J.CITIES.2019.01.005>
- Hudalah, D., Octifanny, Y., Talitha, T., Firman, T., & Phelps, N. A. (2020). From metropolitanization to megaregionalization: Intentionality in the urban restructuring of Java's North Coast, Indonesia. *Journal of Planning Education and Research*, 1-15. <https://doi.org/10.1177/0739456X20967405>
- Hudalah, D., Talitha, T., & Lestari, S. F. (2021). Pragmatic state rescaling: The dynamics and diversity of state space in Indonesian megaproject planning and governance: *Environment and Planning C: Politics and Space*, 1-21. <https://doi.org/10.1177/23996544211030935>
- Hudalah, D., Viantari, D., Firman, T., & Woltjer, J. (2013). Industrial Land Development and Manufacturing Deconcentration in Greater Jakarta. *Urban Geography*, 34(7), 950-971. <https://doi.org/10.1080/02723638.2013.783281>
- Hudalah, D., Winarso, H., & Woltjer, J. (2007). Peri-urbanisation in East Asia: A new challenge for planning? *International Development Planning Review*, 29(4). <https://doi.org/10.3828/idpr.29.4.4>
- Hudalah, D., Winarso, H., & Woltjer, J. (2010a). Planning by opportunity: An analysis of periurban environmental conflicts in Indonesia. *Environment and Planning A*, 42(9). <https://doi.org/10.1068/a4317>

- Hudalah, D., Winarso, H., & Woltjer, J. (2010b). Policy networking as capacity building: An analysis of regional road development conflict in indonesia. *Planning Theory*, 9(4). <https://doi.org/10.1177/1473095210368776>
- Hudalah, D., Winarso, H., & Woltjer, J. (2016). Gentrifying the peri-urban: Land use conflicts and institutional dynamics at the frontier of an Indonesian metropolis. *Urban Studies*, 53(3). <https://doi.org/10.1177/0042098014557208>
- Jessop, B. (2013). Hollowing out the “nation-state” and multi-level governance. In *A Handbook of Comparative Social Policy: Second Edition* (pp. 11 - 26). Edward Elgar Publishing Ltd. <https://doi.org/10.4337/9781782546535.00008>
- Jha, R. (2021, May 26). Catalysts for China’s miracle growth: Rapid urbanisation, integrated city planning. *Observer Research Foundation*.
- Jones, G. W., & Douglass, M. (2008). Introduction. In G. W. Jones & M. Douglass (Eds.), *Mega-urban Regions in Pacific Asia: Urban Dynamics in a Global Era* (pp. 1-18). NUS Press.
- Kim, J. (2006). Networks, Network Governance, and Networked Networks. *International Review of Public Administration*, 11(1), 19-34. <https://doi.org/10.1080/12294659.2006.10805075>
- Kloosterman, R. C., & Musterd, S. (2016). The Polycentric Urban Region: Towards a Research Agenda: <Http://Dx.Doi.Org/10.1080/>

00420980120035259, 38(4), 623-633. <https://doi.org/10.1080/00420980120035259>

Koppenjan, J. F. M., & Klijn, E.-H. (2004). *Managing uncertainties in networks: a network approach to problem solving and decision making*. Routledge.

McGee, T. G. (1991). The emergence of Desakota regions in Asia: Expanding a hypothesis. In N. Ginsburg, B. Koppel, & T. G. McGee (Eds.), *The extended metropolis: Settlement transition in Asia* (pp. 3-26). University of Hawaii Press.

McGee, T. G., & Robinson, I. M. (1995). *The mega-urban regions of Southeast Asia* (Vol. 1). UBC Press.

Provan, K. G., Fish, A., & Sydow, J. (2007). Interorganizational networks at the network level: A review of the empirical literature on whole networks. *Journal of Management*, 33(3), 479-516.

Ross, C. (2009). Introduction. In *Megaregions: Planning for Global Competitiveness* (pp. 1-8). Island Press.

Simon, D., McGregor, D., & Nsiah-Gyabaah, K. (2004). The changing urban-rural interface of African cities: definitional issues and an application to Kumasi, Ghana. *Environment and Urbanization*, 16(2), 235-248. <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/095624780401600214>

Simon, D., McGregor, D., & Thompson, D. (2006). Contemporary

perspectives on the peri-urban zones of cities in developing countries. In D. McGregor, D. Simon, & D. Thompson (Eds.), *The peri-urban interface: Approaches to sustainable natural and human resource use*. Earthscan.

Sorensen, A. (2017). New Institutionalism and Planning Theory. *The Routledge Handbook of Planning Theory*, 250-263. <https://doi.org/10.4324/9781315696072-20>

Swyngedouw, E. (2004). Globalisation or “glocalisation”? Networks, territories and rescaling. *Cambridge Review of International Affairs*, 17(1), 25-48. <https://doi.org/10.1080/0955757042000203632>

UN-Habitat. (2020). *Global State of Metropolis*.

Webster, D., Cai, J., & Muller, L. (2016). The New Face of Peri-Urbanization in East Asia: Modern Production Zones, Middle-Class Lifestyles, and Rising Expectations. *Https://Doi.Org/10.1111/Juaf.12104*, 36(S1), 315-333. <https://doi.org/10.1111/JUAF.12104>

CURRICULUM VITAE



Nama : **DELIK HUDALAH**
Tmpt./tgl lahir : Bandung, 20 Agustus 1982
Kel. Keahlian : Perencanaan Wilayah dan
Perdesaan
Alamat Kantor : Jalan Ganesha 10 Bandung

Nama Istri : Putri Ramadhani
Anak-anak : 1. Zeidra Raja Kaamil Firdaws
2. Zhafira Khansa Sabrina
3. Muhammad Zidny Altair
4. Zahid Syakiel Khalifah

I. RIWAYAT PENDIDIKAN

- Doctor of Philosophy (Ph.D.), bidang Ilmu Keruangan, University of Groningen, Negeri Belanda, 2010
- Magister Teknik (MT.), bidang Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung (ITB), 2006
- Master of Science (M.Sc.), bidang Perencanaan Lingkungan dan Infrastruktur, Negeri Belanda, 2005
- Sarjana Teknik (ST.), bidang Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung (ITB), 2004

II. RIWAYAT PEKERJAAN DI ITB

- Staf Pengajar Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan ITB, 2009-sekarang
- Pengelola Asrama Mahasiswa, 2014-2015
- Sekretaris Board of Reviewers, 2017-2019
- Ketua Board of Reviewers, 2020-sekarang
- Koordinator Kampus Cirebon, 2017-2018
- Sekretaris Bidang Continuing Education Program LPPM, 2018-2020
- Koordinator Penelitian SAPPK, 2020
- Ketua Program Studi Magister dan Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota dan Magister dan Doktor Transportasi, 2021-sekarang
- Sekretaris Komisi II Keilmuan Masa Depan FGB, 2022-sekarang

III. RIWAYAT KEPANGKATAN

- CPNS, III/b, 1 Desember 2008
- Penata Muda tk. 1, III/b, 1 Januari 2010
- Penata, III/c, 1 April 2010
- Pembina, IV/a, 1 April 2018

IV. RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL

- Lektor, 1 Juli 2010
- Lektor Kepala, 1 September 2015
- Profesor/Guru Besar, 1 Agustus 2020

V. KEGIATAN PENELITIAN (10 TAHUN TERAKHIR)

- 2021 - 2023: Urbanisasi Berbasis Kapital pada Kawasan Industri Berjejaring Global: Studi Kasus Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia. World Class Research Program, Indonesia Ministry of Research and Higher Education. Principal Investigator.
- 2021: Corridorization and Transformation (CONTRAST): Urbanization and Planning in Times of Regional Infrastructure Revolution. Riset dan Inovasi ITB.
- 2021: Pengembangan Sistem Perkotaan dan Infrastruktur serta Ketahanan terhadap Bencana Perubahan Iklim pada Kawasan Metropolitan Rebana Jawa Barat. Riset Unggulan Pusat Penelitian ITB. Principal Investigator.
- 2020: Pemberdayaan Perempuan dan Rekausa Sosial Pelestarian Kerajinan Budaya Lokal Berbasis Industri Rumahan di Jawa. Riset Kolaborasi Indonesai PTNBH.
- 2020: Pendekatan Neo-Endogen dalam Pengembangan Wilayah Berkarakteristik Kepulauan (2020). Program Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Inovasi (P3MI) ITB. Principal Investigator.
- 2020: Mekanisme Pendorong Mobilitas Residensial Antar Kawasan Pinggiran Metropolitan. Program Riset ITB Kategori B. Principal Investigator.
- 2019: Rebalancing Indonesia's regional and local development in

the context of decentralization and democratization. Global Minds Fund VLIR-UOS. With Ben Derudder, Department of Geography, University of Gent.

- 2019 - 2020: Rural-Urban Transformation and Megaregion Formation in Indonesia. MIT-Indonesia Research Alliance (MIRA)/ Indonesia-MIT Partnership for Advanced Research and Technology (IMPACT), Indonesia Ministry of Education, Culture, Research, and Technology. With Bish Sanyal and Lawrence Vale. Principal Investigator.
- 2019: Transformasi Kawasan Metropolitan dan Pengaruhnya terhadap Mobilitas Penduduk di Indonesia (2019). Program Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Inovasi (P3MI) ITB. Principal Investigator.
- 2019: Transformasi sistem logistik dalam sistem perkotaan skala megaregion. Program Riset ITB. Principal Investigator.
- 2019: Kajian Kebijakan Standar Biaya Keluaran (SBK) Berbasis Output Pada Skema Penelitian Pengembangan. Kajian Kebijakan Strategis Kemenristekdikti. Principal Investigator.
- 2019: Kajian Kebijakan Standar Biaya Keluaran (SBK) Berbasis Output Pada Skema Penelitian Dasar. Kajian Kebijakan Strategis Kemenristekdikti. Principal Investigator.
- 2018: Rescaling the state: Understanding megaproject/ megaregion planning and institution in Indonesia. Academic

Recharging of the World Class University Program (PAR WCU). Indonesia Ministry of Research and Higher Education. With Nicholas Phelps.

- 2018-2020: Pengembangan Model Perencanaan dan Kelembagaan Proyek Strategis Nasional. Hibah Penelitian Dasar Perguruan Tinggi, Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi. Principal investigator.
- 2018: Contemporary Urbanization in Java: Towards a Megaregion Formation. Program Riset dan Inovasi ITB. Team member.
- 2016 - 2018: Creative Kampongs: mobilizing informal enterprise and innovation for economic development in Indonesia, Sustainable Development Programme, the British Academy. Team member. With Prof. Nicholas Phelps, Bartlett School of Planning, University College London.
- 2017: Sistem dan Pengelolaan Infrastruktur Kewilayahan Megacity di Koridor Jawa. Program Riset Unggulan Institut Teknologi Bandung. Principal Investigator. Rp. 400.000.000.
- 2017: Dinamika wilayah dan kota di Jawa II: Pengaruh Megaregion terhadap Wilayah dan Kota di Sekitarnya. Program Riset dan Inovasi ITB. Principal Investigator.
- 2016: Model Tata Kelola Megacity di Indonesia yang Terintegrasi dan Berkelanjutan (2016) Program Riset Unggulan Institut Teknologi Bandung. Principal Investigator.

- 2015-2016: *Pengembangan Lahan Pinggiran Perkotaan Skala Besar di Era Otonomi Daerah dan Demokratisasi (2015-2016)*. Program Riset Unggulan Perguruan Tinggi, Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi. Principal Investigator.
- 2016: *Model Land Banking untuk Pengembangan Lahan dan Infrastruktur di Indonesia*. (2016). Program Riset Unggulan Perguruan Tinggi, Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi. Team member.
- 2016: *Dinamika wilayah dan kota di Jawa I: sebuah transformasi menuju megaregion (urban and rural dynamics: a transformation to megaregion)*. Program Riset dan Inovasi ITB. Principal Investigator.
- 2015-2016: *Optimalisasi Potensi Sumber Energi Terbarukan Sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) bernuansa Pariwisata Edukasi untuk Pemberdayaan dan Peningkatan Ekonomi Lokal di Wilayah Provinsi Banten*. Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi, Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi. Peneliti anggota.
- 2015-2016: *Dekonsentrasi Perkotaan di Metropolitan Palembang*. Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi, Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi. Team member
- 2015: *Model Pengelolaan Ketahanan Pangan di Perkotaan Indonesia*

(2015). Program Riset dan Inovasi ITB. Principal Investigator.

- 2014: *Inovasi Pengelolaan Daerah di Era Desentralisasi (2014) Hibah Penelitian Kompetensi*, Ditjen Dikti, Kemdikbud. Team member.
- 2014: *Peran Modal Sosial dalam Peningkatan Kerja Sama Pembangunan Kawasan Metropolitan*. Principal Investigator. Riset dan Inovasi Kelompok Keahlian ITB.
- 2013: *Globalisasi dan Politik Suburbanisasi di Kawasan Metropolitan Jakarta*. Principal Investigator. Hibah Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, Ditjen Dikti, Kemdikbud
- 2013: *Dekonsentrasi Industri di Kawasan Metropolitan Gerbangkertosusila*. Program Riset dan Inovasi ITB. Team member.
- 2013: *Kerjasama Antar Daerah Berbasis Pendekatan Terpilah sebagai Solusi Penyelesaian Masalah Kota Metropolitan*. Riset dan Inovasi Kelompok Keahlian ITB. Principal Investigator.
- 2013: *Institusi, Budaya, dan Kerja Sama Pembangunan Wilayah pada Era Otonomi Daerah*. Riset Kelompok Keahlian ITB. Team member.
- 2012: *Urban Deconcentration sebagai Strategi Pengurangan Beban Perkotaan Jakarta (2012) Hibah Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi*, Ditjen Dikti, Kemdikbud. Principal Investigator.
- 2012: *Small Cities, Metropolises and the Future of Urban Indonesia*. The Indonesian Challenges Exploration Grants (ICEG) of the Scientific Programme Indonesia - Netherlands (SPIN), the Royal

Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW).
Postdoctoral research fellow. With Johan Woltjer.

- 2011-2012: *Gejala Post-suburbia di Metropolitan Jabodetabek*. Hibah Riset Ikatan Alumni ITB. Principal Investigator.
- 2010-2012: *Program Peningkatan Nilai Tambah Mata Rantai Produksi melalui Pengembangan Kawasan Terpadu*. Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi (PHKI), Kementerian Pendidikan Nasional. Team member.
- 2011: *Pemekaran dan Pengembangan Wilayah di Indonesia*. Principal Investigator. Hibah Riset dan Inovasi ITB.
- 2011: *Peran Kepemimpinan Daerah dalam Pengembangan Wilayah pada Era Desentralisasi di Indonesia*. Hibah Riset dan Inovasi ITB. Team member.
- 2011: *Perencanaan Wilayah dalam Keberlanjutan Daerah Aliran Sungai*. Hibah Riset dan Inovasi ITB. Team member.
- 2010 - 2011: *Indonesia: State of Low Income Housing Policy (Land Policy and Markets, in relation with Housing*. The World Bank. With Paavo Monkkonen.
- 2010: *Practical Review on Disaster Risk Reduction Program in Indonesia*. OxFam GB and DFID
- 2010: *Kerja Sama Antar-Pemerintah Daerah pada Era Desentralisasi di Indonesia*. Kementerian Pendidikan Nasional. Team member.

- 2010: *Peri-Urbanisasi dan Pengaruhnya terhadap Ekonomi Jabodetabek*. Principal Investigator. Hibah Riset KK ITB.
- 2008 - 2009: Peri-urban land use relationships - Strategies and sustainability assessment tools for urban-rural linkages (PLUREL). The Sixth Framework Programme for research, the European Union. PhD researcher. With Gert de Roo.
- 2007: *The Influences of Large Scale Land Development on the Changing Spatial Structure of Peri-Urban Jakarta*. PhD researcher. Hibah Riset Internasional ITB.

VI. PUBLIKASI

Artikel jurnal

- o **Hudalah, D.**, Octifanny, Y., Talitha, T., Firman, T., & Phelps, N. A. (online first). From Metropolitanization to Megaregionalization: Intentionality in the Urban Restructuring of Java's North Coast, Indonesia. *Journal of Planning Education and Research*. <https://doi.org/10.1177/0739456X20967405>
- o **Hudalah, D.**, Talitha, T., & Lestari, S. F. (2022). Pragmatic state rescaling: The dynamics and diversity of state space in Indonesian megaproject planning and governance. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 40 (2) 481-501. <https://doi.org/10.1177/23996544211030935>.
- o Pratama, I. P., Winarso, H., **Hudalah, D.**, & Syabri, I. (2021).

Extended Urbanization through Capital Centralization: Contract Farming in Palm Oil-Based Agroindustrialization. *Sustainability*, 13(18), 10044. MDPI AG.

Retrieved from <http://dx.doi.org/10.3390/su131810044>

- o Sadewo, E., Syabri, I., Antipova, A., Pradono, & **Hudalah, D.** (2021). Using morphological and functional polycentricity analyses to study the Indonesian urban spatial structure: the case of Medan, Jakarta, and Denpasar. *Asian Geographer*, 38(1), 47-71. <https://doi.org/10.1080/10225706.2020.1737829>
- o **Hudalah, D.** & Adharina, N. (2019) Toward a Global View on Suburban Gentrification: from Redevelopment to Development. *Indonesian Journal of Geography* 51 (1), pp. 97-105. <https://doi.org/10.22146/ijg.34813>
- o Talitha, T., Firman, T., & **Hudalah, D.** (2019). Welcoming two decades of decentralization in Indonesia: a regional development perspective. *Territory, Politics, Governance*, 8(5), pp. 690-708. <https://doi.org/10.1080/21622671.2019.1601595>
- o Sibyan, I. A. & **Hudalah, D.** (2019) Keberlanjutan sosial gated community Taman Dayu, Kabupaten Pasuruan. *Tata Loka* 21(3), pp. 421-431.
- o Indraprahasta, G. S., Derudder, B. & **Hudalah, D.** (2019) Local institutional actors and globally linked territorial development in Bekasi District: A strategic coupling? *Singapore Journal of Tropical*

Geography 40, pp. 219-238 <https://doi.org/10.1111/sjtg.12269>

- o **Hudalah, D.**, Nurrahma, V., Sofhani, T.F., & Salim, W. (2019) Connecting fragmented enclaves through network? Managing industrial parks in the Jakarta-Bandung Urban Corridor. *Cities* 88, pp. 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.01.005>
- o Maninggar, N., **Hudalah, D.**, Sutriadi, R. & Firman, T. (2018) Low-tech industry, regional innovation system, and inter-actor collaboration in Indonesia: The case of Pekalongan batik industry. *Asia Pacific Viewpoint* 59(3) pp. 249-264 <https://doi.org/10.1111/apv.12193>
- o Maninggar, N., & **Hudalah, D.** (2018) Low-tech innovation and local economic development: Case study the traditional batik industry in Pekalongan Municipality. *Tata Loka* 20(1), pp. 1-11.
- o **Hudalah, D.** (2017) Governing industrial estates on Jakarta's peri-urban fringe: From shadow government to network governance. *Singapore Journal of Tropical Geography* 38(1) pp. 58-74. <http://dx.doi.org/10.1111/sjtg.12177>
- o Mardianta, A. V., Kombaitan, B., Purboyo, H. & **Hudalah, D.** (2017) Perkembangan Kawasan Permukiman di Kawasan Mebidang, *Koridor: Jurnal Arsitektur dan Perkotaan*, 8(2), hlm. 118-125.
- o Fahmi, F., Prawira, I., Hudalah, D., & Firman, T. (2016) Leadership and collaborative planning: the case of Surakarta, Indonesia.

Planning Theory 15(3) pp. 294-315.

<http://dx.doi.org/10.1177/1473095215584655>

- o **Hudalah, D.**, Winarso, H. & Woltjer, J. (2016) Gentrifying the peri-urban: Land use conflicts and institutional dynamics at the frontier of an Indonesian metropolis. *Urban Studies* 53 (3), pp. 593-608. <http://dx.doi.org/10.1177/0042098014557208>
- o Winarso, H., **Hudalah, D.** & Firman, T. (2015) Peri-urban transformation in the Jakarta metropolitan area. *Habitat International* 49, pp. 221-229. <http://dx.doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.05.024>
- o **Hudalah, D.**, Firman, T., & Woltjer, J. (2014) Cultural cooperation, institution building, and metropolitan governance in decentralizing Indonesia. *International Journal of Urban and Regional Research* 38 (6), pp. 2217-2234. <http://dx.doi.org/10.1111/1468-2427.12096>
- o LeGates, R. & **Hudalah, D.** (2014) Peri-Urban Planning for Developing East Asia: Learning from Chengdu, China and Yogyakarta/Kartamantul, Indonesia. *Journal of Urban Affairs* 36(s1), pp. 334-353. <http://dx.doi.org/10.1111/juaf.12106>
- o Fahmi, F. Z., **Hudalah, D.**, Rahayu, P., & Woltjer, J. (2014) Extended urbanization in small and medium-sized cities: the case of Cirebon, Indonesia. *Habitat International* 42, pp. 1-10. <http://dx.doi.org/10.1016/j.habitatint.2013.10.003>

- o Talitha, T. & **D. Hudalah** (2014) Model kerjasama antar daerah dalam perencanaan sistem transportasi wilayah metropolitan Bandung Raya. *Tataloka* 16(4), hlm. 194-208.
<http://dx.doi.org/10.14710/tataloka.16.4.194-208>
- o Vidayani, F., D. Fiisabilillah, & **D. Hudalah** (2014) Peran modal sosial dalam kerja sama antar daerah Kartamantul, *Mimbar* 30(2), 01-12. Link
- o **Hudalah, D.**, Viantari, D., Firman, T., & Woltjer, J. (2013) Industrial land development and manufacturing deconcentration in Greater Jakarta. *Urban Geography* 34 (7), pp. 950-971.
<http://dx.doi.org/10.1080/02723638.2013.783281>
- o **Hudalah, D.** (2013) Communicative planning as institutional capacity building: From discourse/network to opportunity. *Tataloka* 15(2), pp. 76-90.
<http://dx.doi.org/10.14710/tataloka.15.2.76-90>
- o Permatasari, P. S. & **Hudalah, D.** (2013) Pola pergerakan dan dekonsentrasi pekerjaan di kawasan metropolitan: Studi kasus pekerja industri Cikarang, Bekasi, *Jurnal Teknik Sipil*, 20(2) pp. 97-106. Link
- o **Hudalah, D.** & Firman, T. (2012). Beyond property: industrial estates and post-suburban transformation in Jakarta Metropolitan Region. *Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning* 29 (1), pp. 40-48. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2011.07.003>

- o **Hudalah, D.**, Winarso H., & Woltjer, J. (2010) Planning by opportunity: An analysis of environmental planning conflicts in Indonesia. *Environment and Planning A* 42 (9), pp 2254-2269. <http://dx.doi.org/10.1068/a4317>
- o **Hudalah, D.**, Winarso H., & Woltjer, J. (2010) Policy networking as institutional capacity building: An analysis of regional road development conflict in Indonesia. *Planning Theory* 9(4) 315-332. <http://dx.doi.org/10.1177/1473095210368776>
- o **Hudalah, D.**, Winarso H., & Woltjer, J. (2007) Peri-urbanisation in East Asia: A new challenge for planning?. *International Development Planning Review* 29 (4), 501-517. <http://dx.doi.org/10.1080/13563470701640176>
- o **Hudalah, D.** & J. Woltjer (2007) Spatial Planning System in Transitional Indonesia. *International Planning Studies*, 12 (3), 291 - 303. <http://dx.doi.org/10.3828/idpr.29.4.4>
- o **Hudalah, D.** (2006) Planning System and Its Driving Forces: A New Institutional Perspective. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 17 (3), 47-62. <http://journals.itb.ac.id/index.php/jpwwk/article/view/4245>
- o **Hudalah, D.** (2005) Pendekatan Pemberdayaan Dalam Penanganan Permukiman Squatter: Sebuah Evaluasi Empiris. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 16 (3), 24-43. <http://journals.itb.ac.id/index.php/jpwwk/article/view/4270>

Buku

- o **Hudalah, D.** (2020) *Teori Lokasi: Perspektif Wilayah dan Kota*. Bandung: Penerbit ITB.
- o Pontoh, N. K., **Hudalah, D.**, Indradjati, P. N., & Viantari, D. (2015) *Dasar-Dasar Survei untuk Perencanaan Wilayah dan Kota* [Introduction to Surveying for Regional and Urban Planning]. Bandung: Penerbit ITB.
- o **Hudalah, D.**, et al (2013) *Pengantar Proses Perencanaan* [Introduction to Planning Process]. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- o **Hudalah, D.** (2010) *Peri-urban Planning in Indonesia: Contexts, Approaches, and Institutional Capacity*. Groningen, the University of Groningen.
http://www.rug.nl/research/portal/files/33030201/13_thesis.pdf

Bab Buku

- o Salim, W. & **Hudalah, D.** (2020) Urban Governance Challenges and Reforms in Indonesia: Towards a New Urban Agenda. In: Dahiya, B. & Das, A. (eds) (2020) *New Urban Agenda in Asia-Pacific: Governance for Sustainable and Inclusive Cities*, pp. 163-180. Singapore: Springer.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-13-6709-0_6
- o **Hudalah, D.**, Benita, T. & Gumilar, I. (2019) Peri-urbanization in the Surabaya Metropolitan Area: An industrial transformation

- perspective, in: Padawangi, R. (2019) *Routledge Handbook of Urbanization in Southeast Asia*, pp. 265-276 London: Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781134799701>
- o Salim, W., **Hudalah, D.**, & Firman, T. (2018) Spatial planning and urban development in Jakarta's Metropolitan Area. In: Hellman, J., Thynell, M. & Voorst, R. (Eds) (2018) *Jakarta: Claiming Spaces and Rights in the City*. Abingdon: Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781351620451>
 - o **Hudalah, D.** & Aritenang, A. (2018) Industrial economies on the edge of Southeast Asian metropolises: from gated to resilient economies. In: McGregor, A., Law, L. & Miller, F. (2018) *Routledge Handbook of Southeast Asian Development*, pp. 120-130. Abingdon: Routledge. <https://www.routledge.com/Routledge-Handbook-of-Southeast-Asian-Development/McGregor-Law-Miller/p/book/9781138848535>
 - o **Hudalah, D.**, Winarso, H. & Woltjer (2018) Gentrifying the Peri-Urban: Land Use Conflicts and Institutional Dynamics at the Frontier of an Indonesian Metropolis. In: Silver, C., Freestone, R., & Demaziere, C. (eds.) (2018) *Dialogues in Urban and Regional Planning 6: The Right to the City*, pp. 134-153. Abingdon: Routledge. <https://www.routledge.com/Dialogues-in-Urban-and-Regional-Planning-6-The-Right-to-the-City/Silver-Freestone-Demaziere/p/book/9781138645486>

- o **Hudalah, D.** & Firman, T. (2017) Mega-suburbanization in Jakarta Mega-urban Region. In: Datta, A. & Shaban, A (eds) (2017) *Mega-urbanization in the Global South: Fast cities and the urban utopias of the postcolonial state*, pp. 151-168. London, Routledge.
<https://www.routledge.com/Mega-Urbanization-in-the-Global-South-Fast-cities-and-new-urban-utopias/Datta-Shaban/p/book/9780415745512>
- o **Hudalah, D.**, Rahmat, Y., and Firman, T (2016) Housing low- and middle-income households: land development and policy practice in two Indonesian cities. In: McCarthy, J. & Robinson, K. (Eds) (2016) *Land and Development in Indonesia: Searching for the People's Sovereignty*, pp. 206-225. Singapore: ISEAS Publishing.
<https://bookshop.iseas.edu.sg/publication/2155>
- o **Hudalah, D.**, F. Z. Fahmi & T. Firman (2013). Regional governance in decentralizing Indonesia: Learning from the success of urban-rural cooperation in Metropolitan Yogyakarta. In Bunnell, T., D. Parthasarathy & E. C. Thompson. *Cleavage, Connection and Conflict: Rural, Urban and Contemporary Asia*, pp. 65-82. Singapore: Springer.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-5482-9_5
- o **Hudalah, D.**, Soepriadi, I.F., and Maryonoputri, L. D., (2011) Karakteristik wilayah peri-urban pada Metropolitan Jabodetabekjur. In Gunawan, M. P., Nurzaman, S. S., and Warpani,

S. P. (2011) *Menarik Pelajaran dari 50 Tahun Perjalanan Perencanaan Wilayah dan Kota di Indonesia*, pp. 345-362. Bandung, Penerbit ITB.

Seminar

- o **Hudalah, D.** (2022) Infrastructure as a Fix: Urban Corridorization Through Crisis and Transformation. Accepted for presentation at *the sixth Global Conference on Economic Geography (GCEG), Territorial Development: Evolution, Innovation, Disruption and Marginalisation under the Anthropocene and the Fourth Industrial Revolution*, Dublin, June 7th - 10th 2022.
- o **Hudalah, D.** (2022) Multidisciplinary research: A gateway to regional innovation and development. Presented at *The 2nd ITB Graduate School Conference (IGSC)*, Bandung, July 21.
- o **Hudalah, D.** (2020) Java's North Coast rural-urban corridor transformation: Rise of a megaregion. Presented at *UGM Urban Research Forum - Seminar Series: Regional Development Corridors: Urban-Rural Linkages*, Department of Planning, Gadjah Mada University, online, December 22.
- o **Hudalah, D.** (2020) Governing private industrial space in Indonesia: shadow government, network governance, and beyond. Presented at *International Urban Talk Series 1: Decoding Private Cities in ASEAN*, Universitas Pembangunan Jaya - Technische Universität Dresden, online, October 27.
- o Rochman, G. & **Hudalah, D.** (2020) How does leadership factors

spur the success of sister city cooperation? *IOP Conference Series: Journal of Physics*. Conf. Series 1469.012032.

- o **Hudalah, D.** (2019) Megaregion as the new scale of urbanization: Exploring Urban Structure and Policy in Contemporary Java, Indonesia. Paper presented at *the 2019 Annual Meeting of American Association of Geographers*, Washington, April 3-7.
- o Mardianta, A. V., Kombaitan, B., Purboyo, H. & **Hudalah, D.** (2019) Pemerintah Daerah dalam Rescaling Pengelolaan Kawasan Metropolitan (Studi Kasus: BRT Mebidang), *Talenta Conference Series: Energy and Engineering* 2(1).
- o **Hudalah, D.**, Talitha, T., Lestari, S. & Sofhani, T. F. (2018) Scaling up/down the state: Understanding megaproject planning and governance in Indonesia. Paper presented at the *2018 Annual International Conference of the Royal Geographical Society (with the Institute of British Geographers)*, Cardiff, 28-31 August.
- o **Hudalah, D.** (2018) Megacorridor as the new scale of urbanization in Java: The institutions and politics of megaproject in times of global competition. Paper to be presented at *the 4th PlanoCosmo International Conference: Transforming beyond borders, starting the New Urban Agenda*, Bandung Institute of Technology, 3-4 April.
- o Octifanny, Y., & **Hudalah, D.** (2017, July). Urban agglomeration and extension in Northern Coast of West Java: A transformation into mega region. *In IOP Conference Series: Earth and Environmental*

Science (Vol. 79, No. 1, p. 012011). IOP Publishing.

- o **Hudalah, D.** & Adharina, N. (2017) Privatization and peri-urban land development in decentralized Indonesia: The case study of Kendal Industrial Park, Semarang Metropolitan Area. Paper presented at “*Asian Regional Conference on Peri-urbanization: Emerging Issues dan Practices*”, Tongji University, Shanghai, 7-10 May.
- o **Hudalah, D.** & Octifanny, Y. (2016) Peri-urbanization in the West Java North Coast: A Transformation into urban super organism? Paper presented at “the Urban Super Organisms in Asia Workshop”, Toronto, September 30 - October 2.
- o **Hudalah, D.**, Benita, Tania (2016) The peri-urban region in Indonesia: An industrial transformation perspective, paper presented on workshop ‘Planning the rurban’, London, October 7.
- o **Hudalah, D.**, Octifanny, Y., & Winarso, H. (2016) Private industrial land development in decentralized Indonesia, paper presented at the conference on “Land, Livelihoods and Displacement, Los Angeles, October 21 - 23.
- o Nurhayati, Y. & **Hudalah, D.** (2016) Institutionalism, transaction cost and land development process in Indonesia: Toward a theoretical assessment. Paper presented at *The 13th International Asian Urbanization Conference*, Yogyakarta, 6 January.
- o **Hudalah, D.**, Nurhayati, Y. & Firman, T. (2015) Land market and

policy for housing the urban poor: a tale of two cities. Paper presented at *the Indonesia Update 2015: Land and Development in Indonesia: Searching for the People's Sovereignty*, Canberra, 17-18 September.

- o **Hudalah, D.** (2015) Beyond the developmental state: Globalization and the politics of peri-urban mega-projects in Jakarta Metropolitan Area. Paper presented at *the RC21 International Conference on The Ideal City: between myth and reality. Representations, policies, contradictions and challenges for tomorrow's urban life*, Urbino (Italy) 27-29 August 2015.
- o Sasongko, M. A. & **Hudalah, D.** (2015) The Role of Leadership in Dynamic Regional Cooperation: The Case of Jakarta Metropolitan Area's Flood Control Cooperation. Paper presented at *the 6th International Conference on Local Government (ICLG)*, Bangkok, 17-18 September 2015.
- o **Hudalah, D.** (2015) Globalization and the Dynamics of Peri-Urban Politics in Greater Jakarta. Paper presented at *the 5th International Conference of Jabodetabek Study Forum*, Bogor, 16-18 March.
- o **Hudalah, D.** (2013) From Dorm to Shop: Mall Building and the Changing Structure of Jakarta Metropolitan Area. Presented at *Transnational Retailers and Retail Change in Southeast Asia*, Singapore, 13-14 December.
- o **Hudalah, D., Woltjer, D., Winarso, D.** (2012) "Gentrifying the Peri-

urban: Conflicts and Planning Discourses on the Edge of Bandung Metropolitan Area”, Paper presented at *the Planocosmo International Seminar*, October 8-9, 2012, Bandung, Indonesia.

- o **Hudalah, D.**, Woltjer, J., Firman, T., and Viantari, D. (2012) Contesting the centrality of Jakarta: Have industrial centres promoted deconcentration? Paper presented at *the International Geographical Congress (IGC)*, August 26-30, 2012, Cologne, Germany.
- o **Hudalah, D.**, Woltjer, J., and Firman, T. (2012) Regional planning in urbanizing Indonesia: Institution and culture in collaborative governance. Paper presented at *the Association of European Schools of Planning (AESOP) Congress*, July 11-15, 2012, Ankara, Turkey.
- o **Hudalah, D.**, Ariandini, D., and Firman, T. (2011). Pattern of local government proliferation in Indonesia: Implications to regional development. Paper presented at *the World Planning School Congress (WPSC)*, July 4-8, 2011, Perth.
- o **Hudalah, D.** (2010) Peri-urbanization and the regional economic performance of Jakarta Metropolitan Region. Paper presented at *Eastern Regional Organisation for Planning and Human Settlements (EAROPH) Congress*, Adelaide, 1-5 November.
- o **Hudalah, D.** (2010) Communicative planning as institutional capacity-building: From discourse/network to opportunity. Paper presented at *Seminar Nasional ASPI: Penguatan Arah Pendidikan dan*

Praktek Perencanaan di Indonesia, 23-24 April 2010, Semarang.

- o **Hudalah, D.**, Winarso, H., Woltjer, J., & Linden, G. J. J. (2009). Constructing opportunity: An analysis of peri-urban environmental conflicts in Indonesia. Paper presented at *Positioning Planning in the Global Crises: An International Conference on Urban and Regional Planning to Celebrate the 50th Anniversary of Planning Education in Indonesia*, Bandung, 12-13 November.
- o **Hudalah, D.**, H. Winarso & J. Woltjer (2009) Policy network and institutional capacity: An analysis of peri-urban environmental and infrastructure planning conflicts in Indonesia. Paper presented at *10th N-AERUS (Network-Association of European Researchers on Urbanization in the South) Conference: Challenges to open cities in Africa, Asia, Latin America and the Middle East: shared spaces within and beyond*, Rotterdam, 1 to 3rd October 2009.
- o **Hudalah, D.** & J. Woltjer (2009) Constructing institutional capacity: The roles of discourse formation in the planning on the edge of Bandung City. Paper presented at *the 23rd Congress of the Association of European Schools of Planning (AESOP): Why can't the future be more like the past?*, 15-19 July 2009, Liverpool, UK.
- o **Hudalah, D.** (2008) Bridging the divide: Struggle for peri-urban space. Paper presented at *the Fourth Joint Congress ACSP-AESOP, Bridging the Divide: Celebrating the City*, Chicago, 10 July.
- o **Hudalah, D.** (2007) Peri-urbanisation in East Asia: From spatial to

institutional rationale. *The 1st IRSA Institute: The Role of Infrastructure in Achieving Millennium Development Goals*, Bandung, 1-2 November.

- o **Hudalah, D.** (2007) Dealing with Fragmented Interfaces: Institutional Challenges for Peri-urban Management in Metropolitan Region of East-Asia. In *The XXI AESOP Conference: Planning for the Risk Society*, Naples, Italy, 11-14 July.

Lain-lain

- o Sagala, S., Lassa, J., Yasaditama, H., & **Hudalah, D.** (2013) The evolution of risk and vulnerability in Greater Jakarta: Contesting Government Policy in dealing with a megacity's exposure to flooding. *Working Paper No. 2*. Kupang: the Institute of Resource Governance and Social Change.
- o **Hudalah, D.** (2013) The little kings and politics of Jakarta's flood management. *The Jakarta Post*, December 14.
- o **Hudalah, D.** (2013) Industrial boom in Greater Jakarta and inclusive development. *The Jakarta Post*, March 9.
- o **Hudalah, D.** (2011) Land policy and its implications for housing the poor. *The Jakarta Post*, September 19.
- o **Hudalah, D.** & T. Firman (2010) Urban development: What to do and what can we expect? Outlook 2011, *The Jakarta Post*, December 20, 2010, p. 16.

VII. PENGHARGAAN

Fellowship

- 2022: Fulbright Visiting Scholar, AMINEF/ Department of Urban Studies and Planning, Massachusetts Institute of Technology
- 2019: VLIR-UOS Joint (Inter)national Academic Networking, Visiting Scholar, Department of Geography, the University of Ghent
- 2018: PAR-WCU, Visiting professor, Faculty of Architecture, Building and Design, the University of Melbourne
- 2012: SPIN-KNAW, Postdoctoral research fellow, Faculty of Spatial Sciences, University of Groningen

Keynote/ Invited Speaker

- 2022-07-21: “The 2nd ITB Graduate School Conference (IGSC), Institut Teknologi Bandung, Bandung
- 2020-12-22: “UGM Urban Research Forum - Seminar Series: Regional Development Corridors: Urban-Rural Linkages”, Department of Planning, Gadjah Mada University, online
- 2020-10-27: “International Urban Talk Series 1: Decoding Private Cities in ASEAN”, Universitas Pembangunan Jaya - Technische Universität Dresden, online

- 2019-05-13: “the International Workshop on the Belt and Road Initiative in Southeast and South Asia: Opportunities and Challenges”, Chinese Academy of Sciences
- 2018-10-10: “the Research Seminar”, Hong Kong University, Hong Kong SAR
- 2017-05-7: “Asian Regional Conference on Peri-urbanization: Emerging Issues dan Practices”, Tongji University, Shanghai
- 2016-10-07: The workshop on ‘Planning the rurban’, University College London
- 2016-10-21: The conference “Land, Livelihoods and Displacement, University of California, Los Angeles
- 2016-10-02: The workshop on “Urban Super-organism”, University of Toronto
- 2015-09-17: “Indonesia Update 2015: Land and Development in Indonesia: Searching for the People’s Sovereignty”, Australian National University, Canberra
- 2015-04-21: The dialogue event “2nd Connective Cities Asian Dialogue Event: Towards Green Cities in Asia, Managing Urban Sprawl”, Surabaya
- 2015-03-16: The 5th International Conference of Jabodetabek Study Forum, “Sustainable Megacities: Vulnerability, Diversity and Livability”, Bogor

- 2013-03-07: Forum Kajian Pembangunan “Industrial suburbanization in Greater Jakarta”, Indonesia Project-ANU, Jakarta
- 2011-07-13: “the Second International Young Planners Forum”, Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), Yogyakarta

Guest lecturer

- 2022-05-23: Faculty of Social Sciences, Waseda University
- 2021-10-08: School of Architecture, Umeå University, online
- 2021-09-27: Department of Urban Planning and Design, Faculty of Architecture, the University of Hong Kong, online
- 2018-10-08: Department of Urban Planning and Design, Faculty of Architecture, the University of Hong Kong
- 2017-05-31: Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- 2017-09-13: Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala
- 2013-01-14: Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Pakuan

Penghargaan lain

- 2022: grantee, Fulbright Visiting Scholar, AMINEF
- 2019: *Finalis Dosen Berprestasi Bidang Sains dan Teknologi*,

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi


- 2019: grantee, World Class Research (WCR) program, Indonesia Ministry of Research, Technology and Higher Education
- 2018: grantee, Academic Recharging World Class University (PAR-WCU) Program, Bandung Institute of Technology
- 2015: *Penghargaan Bidang Penelitian, Anugrah Institut Teknologi Bandung*
- 2013: Penghargaan Bupati Bekasi “Anugrah Pangripta Nusantara”




Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung


Jalan Dipati Ukur No. 4, Bandung 40132


Telp. (022) 2512532, E-mail: sekretariat-fgb@pusat.itb.ac.id

 fgb.itb.ac.id

 [FgbItb](https://www.facebook.com/FgbItb)

 [FGB_ITB](https://twitter.com/FGB_ITB)

 [@fgbitb_1920](https://www.instagram.com/fgbitb_1920)

 [Forum Guru Besar ITB](https://www.youtube.com/ForumGuruBesarITB)

